

LAPORAN KEUANGAN BA 018

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023

BPSIP YOGYAKARTA

018.09.0400.633975.KD

Audited



**Jl. Stadion Maguwoharjo, No. 22, Karangasari, Wedomartani,
Ngemplak, Sleman, Yogyakarta**

Telpon : (0274) 884662, 566823, 514959

Fax : (0274) 4477052

Website : www.vogya.litbang.pertanian.go.id

E-MAIL : BPSIPyogya@yahoo.com, BPSIP-diy@litbang.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSIP YOGYAKARTA adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSIP YOGYAKARTA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSIP YOGYAKARTA. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Yogyakarta, 13 Mei 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Soeharsono, S.Pt, M.Si
NIP. 197109271998031002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - B.2. Belanja
 - B.3. Belanja Pegawai
 - B.4. Belanja Barang
 - B.5. Belanja Modal
 - B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
 - C.1.2. Persediaan
 - C.2. Aset Tetap
 - C.2.1. Tanah
 - C.2.2. Peralatan dan Mesin
 - C.2.3. Gedung dan Bangunan
 - C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - C.2.5. Aset Tetap Lainnya
 - C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 - C.3. Piutang Jangka Panjang
 - C.4. Aset Lainnya
 - C.4.1. Aset Lain-lain
 - C.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.5.2. Uang Muka dari KPPN

- C.6. Ekuitas
 - C.6.1. Ekuitas
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas
 - D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
 - D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPSIP YOGYAKARTA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 15 Mei 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,


Dr. Soeharsono, S.Pt, M.Si
NIP. 197109271998031002



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPSIP YOGYAKARTA Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 352.747.094,00 atau mencapai 236 % dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 148.548.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 9.510.178.015,00 atau mencapai 99,57 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 9.553.871.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 142.887.993.496,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 61.250.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 142.826.788.496,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 81.877.965,00 dan Rp. 142.806.115.531,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 315.708.808,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 10.967.919.284,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp. -10.652.210.476,00. Kegiatan Non

Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp. 190.755.698,00 dan Defisit Rp. -10.461.454.778,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. -10.461.454.778,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 145.190.058.295,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. -10.461.454.778,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. -1.709.918.907,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 9.157.430.921,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 142.806.115.531,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPSIP YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			31 Desember 2022
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	148.548.000,00	352.747.094,00	237	349.879.642,00
Jumlah Pendapatan		148.548.000,00	352.747.094,00	237	349.879.642,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	4.931.523.000,00	4.891.285.641,00	99	7.146.113.736,00
Belanja Barang	B.4.	4.572.748.000,00	4.569.338.704,00	99	3.906.557.028,00
Belanja Modal	B.5.	49.600.000,00	49.553.670,00	99	674.100.000,00
Jumlah Belanja		9.553.871.000,00	9.510.178.015,00	99	11.726.770.766,00

II. NERACA

BPSIP YOGYAKARTA
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	0	0	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	0	0	0
Persediaan	61.205.000	66.502.500	-5.297.500	-7,97
JUMLAH ASET LANCAR	61.250.000	66.502.500	-5.297.500	-7,97
ASET TETAP				
Tanah	124.586.131.002	124.586.131.002	0	0
Peralatan dan Mesin	14.175.403.837	14.351.300.167	-175.896.330	-1,23
Gedung dan Bangunan	20.810.872.859	21.972.514.766	-1.161.641.907	-5,29
Jalan, Irigasi dan Jaringan	839.128.000	757.405.000	81.723.000	10,79
Aset Tetap Lainnya	275.000.000	275.000.000	0	0
AKUMULASI PENYUSUTAN	-17.859.747.202	-16.775.909.809	-1.083.837.393	6,46
JUMLAH ASET TETAP	142.826.788.496	145.166.441.126	-2.339.652.630	-1,61
JUMLAH ASET	142.887.993.496	145.232.943.626	-2.344.950.130	-1,61
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	33.201.195	30.506.291	2.694.904	8,83
Pendapatan Diterima Dimuka	48.676.770	12.379.040	36.297.730	293,22
Uang Muka dari KPPN	0	0	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	81.877.965	42.885.331	38.992.634	90,92
JUMLAH KEWAJIBAN	81.877.965	42.885.331	38.992.634	90,92
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	142.806.115.531	145.190.058.295	-2.383.942.764	-1,64
JUMLAH EKUITAS	142.806.115.531	145.190.058.295	-2.383.942.764	-1,64
JUMLAH EKUITAS	142.806.115.531	145.190.058.295	-2.383.942.764	-1,64
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	142.887.993.496	145.232.943.626	-2.344.950.130	-1,61

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL BPSIP YOGYAKARTA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	315,708,808	237,740,570	77,968,238	32.796
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	315,708,808	237,740,570	77,968,238	32.796
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	315,708,808	237,740,570	77,968,238	32.796
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,890,845,321	7,145,077,958	(2,254,232,637)	(31.549)
Beban Persediaan	281,880,375	545,486,470	(263,606,095)	(48.325)
Beban Barang dan Jasa	3,185,101,107	2,235,051,786	950,049,321	42.507
Beban Pemeliharaan	543,602,778	619,250,243	(75,647,465)	(12.216)
Beban Perjalanan Dinas	764,797,168	584,755,710	180,041,458	30.789
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	10,673,000	0	10,673,000	
Beban Bunga	0	0	0	

Laporan Keuangan Semester 2 Tahun Anggaran 2023

			KENAIKAN/ PENURUNAN	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,291,019,535	1,426,302,122	(135,282,587)	(9.485)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	10,967,919,284	12,555,924,289	(1,588,005,005)	(12.647)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(10,652,210,476)	(12,318,183,719)	1,665,973,243	(13.525)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(18,267,858)	45,701,888	(63,969,746)	(139.972)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	45,701,888	(45,701,888)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	18,267,858	0	18,267,858	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	209,023,556	536,641,704	(327,618,148)	(61.05)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	209,023,556	536,641,704	(327,618,148)	(61.05)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON	190,755,698	582,343,592	(391,587,894)	(67.243)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(10,461,454,778)	(11,735,840,127)	1,274,385,349	(10.859)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(10,461,454,778)	(11,735,840,127)	1,274,385,349	(10.859)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BPSIP YOGYAKARTA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022**

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	145,190,058,295	145,123,190,925	66,867,370	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10,461,454,778)	(11,735,840,127)	1,274,385,349	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1,079,918,907)	425,817,045	(1,505,735,952)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,079,918,907)	425,817,045	(1,505,735,952)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	9,157,430,921	11,376,890,452	(2,219,459,531)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,383,942,764)	66,867,370	(2,450,810,134)	-
EKUITAS AKHIR	142,806,115,531	145,190,058,295	(2,383,942,764)	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPSIP YOGYAKARTA

BPSIP Yogyakarta didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan untuk dapat menghasilkan inovasi teknologi pertanian, kelembagaan dan kebijakan pertanian spesifik lokasi yang diperlukan dalam membangun sector pertanian daerah yang tangguh dan berdaya saing.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2023 tentang Kementerian Pertanian.

BSIP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya, BSIP menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Program Strategis BPSIP:

a. Agro Standar

Merupakan program strategis dalam menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sebagai LSPro, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dll) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada seluruh stakeholder bidang pertanian menghadapi

era persaingan global untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui sektor pertanian yang maju, mandiri dan modern.

b. Pengujian Instrumen Pertanian

BSIP melaksanakan program pengujian instrumen pertanian. Instrumen pertanian adalah: 1) alat dan mesin pertanian yang dipakai pada onfarm dan for farm untuk mendukung produksi pertanian (seperti alsin: pengelolaan, budi daya, panen, dan pascapanen, pengolahan hasil pertanian termasuk alsin yang berbasis AI, IoT, dan Cyber Physical System); 2) sarana budi daya (berupa lahan, air, benih, bibit, pupuk, pestisida); 3) unit pelayanan teknis standar pertanian dan UPBS; 4) dokumen resmi seperti standar, rekomendasi, pedoman umum, kebijakan.

Ruang lingkup instrumen pertanian dikelompokkan menjadi:

1. Instrumen fisik: lahan pertanian, irigasi pertanian, pupuk, pestisida, alsintan, pakan ternak, pembiayaan pertanian.
2. Instrumen biologi: varietas/galur tanaman dan ternak, benih/bibit tanaman dan ternak, mikroorganisme, DNA/RNA tanaman dan ternak.
3. Instrumen sistem: usaha tani integrasi tanaman-ternak/tanaman-tanaman/ternak-ternak, pascapanen pertanian, bioteknologi pertanian, perizinan pertanian, peningkatan kapasitas petani dan peternak.

Pengujian instrumen pertanian dilakukan melalui Balai Besar Pengujian, Balai Pengujian dan Loka Pengujian lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

c. Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Pertanian

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melakukan penilaian kesesuaian melalui kegiatan pengujian, inspeksi, dan/atau Sertifikasi untuk menyatakan bahwa suatu instrumen pertanian (barang, jasa, sistem, proses, dan personal) telah sesuai dengan Persyaratan Acuan.

Berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Persyaratan Acuan merupakan dokumen yang memuat kriteria yang digunakan sebagai acuan persyaratan Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal. Persyaratan Acuan ditetapkan dalam:

1. SNI yang ditetapkan oleh BSN;
2. SNI yang ditetapkan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang pemberlakuan keseluruhan atau sebagian parameter secara wajib dari satu atau lebih SNI;
3. peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang pemberlakuan persyaratan teknis, kualifikasi, dan kompetensi yang mengacu pada Standar lain atau ketentuan lainnya sebelum SNI ditetapkan;
4. peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang pemberlakuan keseluruhan atau sebagian parameter secara wajib dari satu atau lebih SNI, dan persyaratan teknis yang mengacu pada Standar lain dan/atau ketentuan lain sesuai dengan tujuan pemberlakuan;
5. ketentuan yang termuat dalam keberterimaan terhadap hasil Penilaian Kesesuaian secara timbal balik; dan/atau
6. Standar dan/atau Persyaratan Acuan lain yang diperlukan untuk kepentingan nasional.

d. Penyediaan Benih Terstandar Dan Bersertifikat

Merupakan salah satu program utama Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam menjamin mutu keamanan pangan dan meningkatkan daya saing produk pertanian melalui ketersediaan benih/bibit terstandar dan bersertifikat. BSIP memiliki sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang handal dan terampil dalam melaksanakan produksi benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan untuk mendukung capaian produksi nasional.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPSIP YOGYAKARTA. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPSIP YOGYAKARTA menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPSIP YOGYAKARTA dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPSIP YOGYAKARTA yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPSIP YOGYAKARTA adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPSIP YOGYAKARTA telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	73.698.000	73.698.000
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	74.850.000	74.850.000
Jumlah Pendapatan	148.548.000	148.548.000
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.042.231.000	4.889.350.000
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	20.460.000
Belanja Lembur	40.000.000	21.713.000
Belanja Barang Operasional	1.279.718.000	1.294.896.000
Belanja Barang Non Operasional	394.193.000	1.514.703.000
Belanja Barang Persediaan	65.340.000	91.241.000
Belanja Jasa	386.376.000	374.498.000
Belanja Pemeliharaan	520.906.000	531.720.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	413.330.000	765.690.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	49.600.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Jumlah Belanja	9.142.094.000	9.553.871.000

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 352.747.094,00,00 atau mencapai 237 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 148.548.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	74,850,000	36.579.000	48,87
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	73,698,000	315.427.538	428
Pendapatan Lain-Lain	0	740.556	0
Jumlah	148,548.000	352.747.094	237,46

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami penurunan sebesar -0.82% dibandingkan TA 2022. Penurunan ini disebabkan antara lain karena:

1. Pendapatan dari penerimaan Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu jg lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Terkait adanya perubahan PP tarif Selama bulan September dan Oktober Laboratorium tidak menerima sample sehingga tidak ada PNBPN yang di hasilkan dari pengujian analisa pupuk.

Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPSIP YOGYAKARTA adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	36.579.000	70.004.500	-47,75
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	315.427.538	207.248.438	52,20
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	
Pendapatan Lain-Lain	740.556	72.626.704	-98,98
Jumlah	352.747.094	349.879.642	0,82

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 9.510.178.015,00 atau 99,58% dari anggaran belanja sebesar Rp. 9.553.871.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	4.931.523.000	4.893.693.735	99,23
Belanja Barang	4.559.863.000	4.569.338.704	100,21
Belanja Modal	49.600.000	49.553.670	99,91
Total Belanja Kotor	9.553.871.000	9.512.586.109	99,57
Pengembalian Belanja		2.408.094	
Total Belanja	9.553.871.000	9.510.178.015	99,54

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 18,89 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat sebanyak 25 pegawai yang beralih ke BRIN dan adanya beberapa pegawai yang memasuki purna tugas di tahun 2023 ini, sehingga belanja pegawainya berkurang cukup signifikan.
2. Tahun anggaran 2023 ini belanja modal ahanya untuk peralatan dan mesin sedangkan tahun lalu belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan dan belanja modal irigasi.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi	Realisasi	.%
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	
Belanja Pegawai	4.891.285.641	7.146.854.037	-31,53
Belanja Barang	4.569.338.704	3.907.354.428	16,94
Belanja Modal	49.553.670	674.100.000	-92,65
Total Belanja	9.510.178.015	11.728.308.465	-18,89

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.891.285.641,00 dan Rp 7.061.767.037,00

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 31,56 % dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Terdapat sebanyak 25 pegawai yang beralih ke BRIN
2. A adanya beberapa pegawai yang memasuki masa purna tugas

Perbandingan Belanja Pegawai
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.855.094.127	7.061.767.037	-31,25
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	17.033.608	0	
Belanja Lembur	21.566.000	85.087.000,00	-74,65
Jumlah Belanja Kotor	4.893.693.735	7.146.854.037	-31,53
Pengembalian Belanja Pegawai	2.408.094	370.216	550,46
Jumlah Belanja	4.891.285.641	7.146.483.821	-31,56

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.569.338.704,00 dan Rp. 3.096.557.028,00. Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 16,97 % dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena pada tahun 2023 adalah masa peralihan BPTP ke BPSIP sehingga tahun kemarin kegiatannya lebih sedikit dibandingkan dengan tahun ini.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.294.825.687	1.059.400.214	22,22
Belanja Barang Non Operasional	1.513.049.812	771.411.531	96,14
Belanja Barang Persediaan	91.093.955	522.100.100	-82,55
Belanja Jasa	374.090.384	379.439.580	-1,41
Belanja Pemeliharaan	531.481.698	589.449.893	-9,83
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	764.797.168	585.553.110	30,61
Jumlah Belanja Kotor	4.569.338.704	3.907.354.428	16,94
Pengembalian Belanja Barang		797.400	-100,00
Jumlah Belanja	4.569.338.704	3.906.557.028,00	16,97

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 49.553.670,00 dan Rp. 674.100.000,00. Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami penurunan 96,75 % dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 sebagian besar masih dalam proses pengadaan.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.553.670,00	130.100.000,00	-61,91
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	199.000.000,00	-100,00
Belanja Modal Irigasi	0	345.000.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	49.553.670,00	674.100.000,00	-92,65
Pengembalian Belanja Barang	0	0	
Jumlah Belanja	49.553.670,00	674.100.000,00	-92,65

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian uang kas di Bendahara pengeluaran terdiri dari uang di brankas Rp. 0,00 dan uang di rekening Bank Rp. 0,00

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

C.1.3 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 61.205.000,00 dan Rp. 66.502.500,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	0,00	0,00
Bahan Baku	0,00	66.502.500,00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan ke Masyarakat	61.205.000,00	0,00
Jumlah	61.205.000,00	66.502.500,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPSIP YOGYAKARTA per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp124.586.131.002,00 dan Rp124.586.131.002,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPSIP YOGYAKARTA per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.175.403.837,00 dan Rp. 14.351.300.167,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	14.351.300.167,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	49.553.670,00
Mutasi kurang	
Penghapusan	225.450.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	14.175.403.837,00
Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023	-13.753.321.239,00
Nilai buku per 31 Desember 2023	422.082.598,00

Mutasi kurang sebesar Rp. 225.450.000,00 berupa penghapusan yang terdiri atas:

- Satu unit kendaraan roda dua
- Satu unit kendaraan roda tiga
- Satu unit mesin cetak

Mutasi tambah sebesar Rp. 49.553.670,00 berupa pembelian yang terdiri atas:

- Satu buah desikator
- Satu buah autoclaf
- Germinator
- Mixer Horosontal
- Grinder
- Lux Metre

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPSIP YOGYAKARTA per 31 Desember 2023 dan Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.810.872.859,00 dan Rp. 21.972.514.766,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	21.972.514.766,00
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan	0
Mutasi kurang	
Koreksi Pencatatan	-1.161.641.907,00
Saldo per 31 Desember 2023	20.810.872.859,00
Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023	-3.873.508.680,00
Nilai buku per 31 Desember 2023	16.937.364.179,00

Mutasi kurang sebesar Rp. 1.161.641.907,00 merupakan Koreksi Susulan Bangunan Gedung Kantor Permanen untuk menyesuaikan nilai aset Bangunan Gedung Kantor karena adanya migrasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAKTI dan transaksi normalisasi.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPSIP YOGYAKARTA 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 839.128.000,00 dan Rp. 757.405.000,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	757.405.000,00
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan	81.723.000,00
Mutasi kurang	
Koreksi Pencatatan	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	839.128.000,00
Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023	-232.917.283,00
Nilai buku per 31 Desember 2023	606.210.717,00

Mutasi tambah sebesar Rp. 81.723.000,00 merupakan Koreksi Susulan Jalan Khusus Kompleks untuk menyesuaikan nilai aset jalan karena adanya migrasi SMAK BMN ke Aplikasi SAKTI dan transaksi Normalisasi jalan.

C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPSIP YOGYAKARTA per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.-17.859.747.202,00 dan Rp.-16.775.909.809,00 .

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	124.586.131.002,00		124.586.131.002,00
2.	Peralatan dan Mesin	14.175.403.837,00	13.753.321.239	422.082.598,00
3.	Gedung dan Bangunan	20.810.872.859,00	3.873.508.680	16.937.364.179,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	839.128.000	232.917.283	606.210.717,00
Jumlah		160.411.535.698,00	17.859.747.202,00	142.551.788.496,00

C.2.6 Aset Tetap Lainnya

Nilai saldo Aset Tetap lainnya yang dimiliki BPSIP YOGYAKARTA per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 275.000.000,00 dan Rp. 275.000.000,00. Aset ini berupa alat musik gamelan. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	275.000.000,00
Mutasi Tambah	
Hasil Inventarisasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2022	275.000.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	275.000.000,00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 33.201.195,00 dan Rp. 30.506.291,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BPSIP YOGYAKARTA per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	370.000,00	810.320,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	32.831.195,00	29.695.971,00
Jumlah	33.201.195,00	30.506.291,00

Nilai utang kepada pihak ketiga senilai Rp. 328.199.934,00 terdiri atas :

1. Kekurangan tunjangan umum pegawai bulan November dan Desember 2023 yang belum dibayarkan Rp. 370.000,00.
2. Beban Listrik dan Telpon bulan Desember 2022 yang belum dibayarkan Rp. 32.831.195,00.

C.5.2 Pendapatan diterima dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 48.676.770,00 dan Rp. 12.379.040,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka.

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Sewa bangunan kantor lainnya	48.676.770,00	12.379.040,00
Jumlah	48.676.770,00	12.379.040,00

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dan adalah masing-masing sebesar Rp. 142.887.993.496,00 dan Rp. 145.232.9432.626,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 315.708.808,00 dan Rp. 237.740.570,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	40.700.000,00	61.450.000,00	-33,77
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	36.579.000,00	70.004.500,00	-47,75
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	185.362.288,00	88.338.100,00	109,83
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	79.631.750,00	17.947.970,00	343,68
Jumlah	315.708.808,00	237.740.570,00	32,80

Jumlah pendapatan jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran Pendapatan senilai Rp. 352.747.094,00 terdapat selisih sebesar Rp. 37.038.286,00. Selisih ini terdiri atas :

1. Penerimaan kembali Belanja Tahun Anggaran yang lalu Rp. 740.566,00
2. Penyesuaian atas pendapatan sewa diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp. 36.297.730,00

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.890.845.321,00 dan Rp. 7.145.077.958,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik/(Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.300.891.700	4.473.490.300	-26,21
Beban Pembulatan Gaji PNS	46.125	60.158	-23,33
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	237.802.220	308.614.030	-22,95
Beban Tunj. Anak PNS	66.507.916	79.483.886	-16,33
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	483.950.000	1.186.663.900	-59,22
Beban Tunj. PPh PNS	25.985.992	82.041.704	-68,33
Beban Tunj. Beras PNS	179.456.760	222.256.980	-19,26
Beban Uang Makan PNS	465.095.000	611.095.000	-23,89
Beban Tunjangan Umum PNS	67.310.000	71.085.000	-5,31
Beban Gaji Pokok PPPK	10.588.800	0	
Beban Pembulatan Gaji PPPK	112	0	
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.058.880	0	
Beban Tunjangan Anak PPPK	211.776	0	
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1.400.000	0	
Beban Tunjangan Beras PPPK	869.040	0	
Beban Uang Makan PPPK	2.905.000	0	
Beban Uang Lembur	21.566.000	-	
Jumlah	4.890.845.321	7.059.990.958	-30,72

Jumlah beban pegawai jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 4.891.285.641,00,00 terdapat selisih sebesar Rp. 440.320,00 . Nilai ini merupakan belanja pegawai yang masih harus dibayar senilai Rp. 370.000,00 dan jurnal balik akrual belanja pegawai tahun 2022 Rp.-810.320,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 281.880.375,00 dan Rp. 545.486.470,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang

dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	204.989.500,00	75.960.400,00	169,86
Beban Persediaan konsumsi	63.549.375,00	359.291.200,00	-82,31
Beban persediaan lainnya	0,00	46.516.500,00	-100,00
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	8.331.200,00	481.768.100,00	-98,27
Jumlah	281.880.375,00	545.486.470,00	253,52

Jumlah realisasi belanja barang persediaan pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 91.093.955,00. Nilai beban persediaan per 31 Desember 2023 jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 terdapat selisih sebesar Rp. – 190.786.420,00. Atas selisih tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

- Saldo awal senilai Rp. 66.502.500,00
- Perolehan lainnya/ UPBS senilai Rp. 196.850.000,00
- Beban pemeliharaan senilai Rp. -12.121.080,00
- Penyesuaian persediaan Rp. 760.000
- Saldo akhir Rp. 190.786.420,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.185.101.107,00 dan Rp. 2.235.051.786,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Bahan	1.264.428.856,00	329.460.810,00	283,79
Beban Barang Operasional Lainnya	249.990.000,00	0,00	
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	
Beban Barang Non Operasional Lainnya	248.620.956,00	423.800.721,00	-41,34
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	81.035.000,00	-100,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	126.168.000,00	156.480.000,00	-19,37
Beban Honor Output Kegiatan	0	18.150.000,00	-100,00
Beban Keperluan Perkantoran	918.667.687,00	821.885.214,00	11,78
Beban Langganan Listrik	340.258.263,00	369.067.625	-7,81
Beban Langganan Telepon	12.167.345,00	27.658.326,00	-56,01
Beban Sewa	10.000.000	369.067.265,00	-97,29
Belanja jasa profesi	14.800.000	5.000.000	196,00
Jumlah	3.185.101.107,00	2.235.051.786,00	42,51

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.181.965.863,00. Beban persediaan per 31 Desember 2023 jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 terdapat selisih sebesar Rp. - 3.135.244 ,00. Selisih ini terdiri atas :

1. Belanja Barang yang masih harus dibayar Rp. 32.831.195,00
2. Jurnal balik akrual listrik dan telepon tahun 2022 Rp. -29.695.971,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 543.602.778,00 dan Rp. 619.250.243,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi

normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	275.119.133,00	373.408.125,00	-26,32
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	256.362.565,00	216.041.768,00	18,66
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	12.121.080	29.327.650,00	-58,67
Beban Persediaan suku cadang		132.700,00	-100,00
Jumlah	543.602.778,00	619.250.243,00	-12,22

Jumlah realisasi belanja pemeliharaan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. 531.481.698,00. Nilai beban pemeliharaan per 31 Desember 2023 jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 terdapat selisih sebesar Rp. 12.121.080,00. Selisih ini merupakan beban persediaan untuk pemeliharaan dan suku cadang yang belanjanya menggunakan akun persediaan dan pada Laporan Operasional membentuk akun beban persediaan untuk bahan pemeliharaan.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 764.797.168,00. Dan Rp. 584.755.710,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	678.247.168,00	496.695.710,00	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	86.550.000,00	88.060.000,00	
Jumlah	764.797.168,00	584.755.710,00	

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.673.000,00 dan Rp. 0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat terdapat selisih senilai Rp. 10.673.000,00. Nilai ini merupakan pencatatan atas benih yang diserahkan kepada masyarakat.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.291.019.535,00 dan Rp. 1.426.302.122,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	275.119.133,00	595.415.354,00	-53,79
Beban Penyusutan Irigasi	16.442.354,00	16.442.354,00	0,00

Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	97.723.000,00	16.000.000,00	510,77
Beban Penyusutan Jaringan	1.115.850,00	1.115.850,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	633.124.881,00	797.328.568,00	-20,59
Jumlah	1.291.019.535,00	1.426.302.122,00	-9,48

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	207.523.000,00	464.015.000,00	55,28
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	45.701.888,00	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	740.556,00	23.733.954,00	96,88
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	48.892.750,00	100,00
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	760.000	0,00	0,00
Jumlah	209.023.556,00	582.343.592,00	64,11

Surplus / defisit dari kegiatan non operaional terdiri atas :

- Pendapatan perolehan aset lainnya senilai Rp. 136.625.000,00 berasal dari transaksi pencatatan benih masuk UPBS
- Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp. 740.566,00
- Pendapatan penyesuaian nilai persediaan

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 145.190.058.295,00 dan Rp. 145.123.190.925,00 .

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. -10.461.454.778,00 dan Rp. -11.735.840.127. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp -1.079.918.907,00 dan Rp 425.817.045,00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp. 0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 6,.599.602.350,00 dan Rp. 9.127.331.763,00,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023

Jenis Transaksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	9.510.178.015,00
Diterima dari Entitas Lain	-352.747.094,00
Jumlah	9.157.430.921,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 saldo DDEL adalah sebesar Rp. 352.747.094,00 sedangkan DKEL sebesar Rp. 349.879.642,00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 142.806.115.531,00 dan Rp. 145.190.058.295,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

I. Entitas Pelapor

- a. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang Pertanian yang berada di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alamat Jalan Stadion Maguwoharjo No. 22 Karang Sari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.
- b. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala dengan kedudukan sebagai Eselon III. Selain Kepala yang menduduki jabatan eselon III, terdapat satu struktural eselon IV yaitu pada Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta sebagai UAKPA/B lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, sesuai dengan Permentan No. 41/Permentan OT.140/9/2008 tanggal 4 September 2008, mendapat tugas tambahan yaitu menjadi sekretariat dan koordinator UAPPA/B-W.

II. Catatan Penting Lainnya

Pada tahun 2023 ini BPSIP DI Yogyakarta terdapat kerjasama kemitraan dengan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dengan judul kegiatan Pengendalian Lalat Buah Skala Luas Serta Pendampingan Kelembagaan Penerapan GAP dan GHP Pada Kawasan Salak Pondoh Mendukung Peningkatan Ekspor. Kegiatan ini berlokasi di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan ini senilai Rp. Rp. 200.000.000,00 dengan Penanggungjawab Kegiatan adalah Dr. Soeharsono, S.Pt, M.Si